

Rumah Tangga Pra Sejahtera, Kebudayaan Kemiskinan, dan Program Penanggulangan Kemiskinan (Studi di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)

Regina Rahma Pramudyani, Sugeng Harianto

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 June 2026
Revised 20 June 2026
Accepted 25 June 2026
Available online 08 July 2026

Keywords

pre-prosperous households, culture of poverty, adaptive strategies, poverty alleviation programs, Oscar Lewis.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study examines the socio-economic conditions of pre-prosperous households, the practices of the culture of poverty, adaptive strategies for coping with poverty, and the effectiveness of poverty alleviation programs in Munggu Village, Bungkal District, Ponorogo Regency. This research employed a qualitative approach using participatory observation, unstructured interviews, and documentation techniques. The research subjects were selected through purposive sampling and consisted of ten pre-prosperous households receiving social assistance in Munggu Village. Data were analyzed through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The findings reveal four major points. First, the socio-economic conditions of pre-prosperous households in Munggu Village are characterized by unstable incomes derived from traditional agriculture and informal employment, low educational attainment, and inadequate housing conditions. Second, the culture of poverty is manifested through fatalistic and resigned attitudes, a short-term life orientation, dependence on social assistance, the intergenerational transmission of poverty, and declining life expectations, all of which are consistent with Lewis's concept of the culture of poverty. Third, the adaptive strategies adopted by these households include livelihood diversification, strict household expenditure management, the utilization of social networks through informal borrowing and lending practices, reliance on social assistance as a buffer for meeting basic needs, and the adoption of a modest lifestyle. Fourth, poverty alleviation programs, including the Family Hope Program (PKH), Direct Cash Assistance (BLT), and Social Welfare Assistance (Kesra), have proven effective in providing short-term benefits for fulfilling basic needs and supporting children's education. However, these programs have not been able to transform the structural conditions of poverty because they remain predominantly charitable in nature and have yet to address sustainable economic empowerment.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kondisi sosial ekonomi rumah tangga pra sejahtera, praktik kebudayaan kemiskinan, strategi adaptif dalam menghadapi kemiskinan, serta efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode observasi partisipatoris, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Subjek penelitian dipilih secara purposive sampling, terdiri dari sepuluh rumah tangga pra sejahtera penerima bantuan sosial di Desa Munggu. Hasil penelitian menunjukkan empat temuan utama. Pertama, kondisi sosial ekonomi rumah tangga pra sejahtera di Desa Munggu ditandai oleh ketidakstabilan pendapatan yang bersumber dari sektor pertanian tradisional dan pekerjaan informal, rendahnya tingkat pendidikan, serta kondisi hunian yang belum memadai. Kedua, praktik kebudayaan kemiskinan termanifestasi dalam bentuk sikap fatalistik dan pasrah, orientasi hidup jangka pendek, ketergantungan terhadap bantuan sosial, pewarisan kemiskinan antargenerasi, dan penurunan ekspektasi hidup yang selaras dengan konsep culture of poverty Lewis. Ketiga, strategi adaptif yang diterapkan meliputi diversifikasi mata pencaharian, pengelolaan pengeluaran secara ketat, pemanfaatan jaringan sosial melalui praktik utang piutang informal, mengandalkan bantuan sosial sebagai penyangga kebutuhan, serta penerapan gaya hidup sederhana. Keempat, program penanggulangan kemiskinan berupa PKH, BLT, dan bantuan Kesra terbukti memberikan dampak positif jangka pendek dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan, namun belum mampu mengubah kondisi struktural kemiskinan karena masih bersifat karitatif dan belum menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan terus bertambah setiap tahunnya, Indonesia dianggap selaku negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia ialah satu diantara dari sekian banyak negara berkembang yang terdiri dari sejumlah pulau, yang masing-masing pulau dengan cara alami mengelola perekonomian dengan metode yang unik guna membangun negara berikut. Tentu saja, guna membangun preferensi dengan jalur yang sudah ditetapkan sebagaimana ditetapkan pada pembangunan jangka menengah dan jangka pendek, pembangunan harus dilaksanakan selaras dengan ketentuan yang sistematis dan harmonis (Bank Dunia). Oleh karena itu, rahasia pembangunan yang efektif ialah persiapan yang cermat.

Pertumbuhan ekonomi dan taraf kemiskinan ialah dua metrik yang bisa dipakai guna mengukur taraf kemajuan pembangunan suatu negara. Satu-satunya cara guna mengurangi kemiskinan di banyak negara ialah lewat perluasan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ialah prasyarat guna menurunkan taraf kemiskinan dan ukuran keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi memperlihatkan berapa banyak uang yang akan dihasilkan masyarakat selama periode waktu tertentu selaku hasil dari kegiatan ekonomi. Sumber-sumber pertumbuhan berikut diharapkan bisa membantu mengurangi kemiskinan dan mengoptimalkan kesejahteraan mereka yang kurang beruntung (Maulana F., 2020). Oleh karena itu, tujuan utamanya ialah pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ketika standar hidup suatu daerah tidak terpenuhi, maka hal itu disebut kemiskinan. Ketidamampuan guna mencukupi kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan ialah hal yang mendefinisikan situasi kemiskinan berikut. Menurunnya kemampuan guna mencukupi standar hidup yang umum, termasuk yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan masyarakat, juga akan dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas pendapatan berikut. Kemampuan masyarakat guna mencukupi standar hidup dengan pendapatannya menentukan apakah masyarakat tersebut dianggap miskin (Nugroho, 1995). Dengan cara teori, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat hanyalah satu diantara aspek dari taraf hidupnya, aspek lainnya termasuk pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Satu diantara kesejahteraan ataupun taraf hidup masyarakat ialah lokasi tempat tinggal ataupun permukiman yang layak. Dengan demikian, masyarakat dikategorikan miskin apabila pendapatannya jauh di bawah taraf rerata nasional, sehingga membatasi prospek kesejahteraannya (Suryawati, 2004). Dengan kata lain, kemiskinan ialah masalah yang rumit dan mempunyai banyak sisi.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, kemiskinan ialah keadaan sosial ekonomi di mana hak-hak dasar individu ataupun kelompok individu untuk tetap hidup pada kemiskinan tidak terpenuhi. Pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, air bersih, tanah, sumber daya alam, lingkungan hidup, keamanan dari agresi ataupun ancaman, dan kemampuan untuk ikut serta pada perencanaan kehidupan sosial dan politik ialah contoh kebutuhan dasar yang ialah hak bagi individu ataupun kelompok individu. Berlandaskan Laporan Sektor Kesejahteraan Rakyat (Kesra) tahun 2004, mereka yang bekerja namun penghasilannya terlalu sedikit guna menutupi kebutuhan dasar mereka juga dianggap berada pada kemiskinan. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakan dengan cara terpadu dan menyeluruh.

Rumah tangga pra-sejahtera, yang ialah kelompok masyarakat yang berada di ambang batas kemiskinan, menjadi fokus utama pada program penanggulangan kemiskinan. Mereka ialah individu dan keluarga yang mempunyai pendapatan yang tidak mencukupi guna mencukupi kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. pada konteks berikut, program penanggulangan kemiskinan harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi lokal, termasuk budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. berikut penting agar program yang dijalankan tepat sasaran.

Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwasannya jumlah penduduk miskin di Indonesia tetap signifikan pada beberapa tahun terakhir. Pada bulan Maret 2024, ada sekitar 25,22 juta jiwa yang tergolong miskin, dengan rerata rumah tangga miskin terdiri atas 4,78 anggota rumah tangga. Angka berikut menggambarkan bahwasannya masih banyak rumah tangga yang terperangkap pada kemiskinan struktural dan kultural. Di taraf provinsi, data kemiskinan di Jawa Timur juga memperlihatkan hal serupa, di mana per September 2024 tercatat ada 3,98 juta penduduk miskin ataupun 9,56 persen dari total penduduk.

Satu diantara prioritas global yang digariskan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2016–2030 ialah pengurangan kemiskinan. Hal berikut memperlihatkan bahwasannya kemiskinan ialah masalah yang tersebar luas di semua negara. Karena ketidakmampuan ekonomi (miskin) bisa membatasi akses masyarakat kepada sumber daya, tujuan mulia guna mengurangi dan menghilangkan kemiskinan pada segala bentuknya bukanlah tanpa pembenaran. taraf kemiskinan yang tinggi bisa menimbulkan masalah di berbagai bidang masyarakat dan ekonomi.

Fenomena kemiskinan yang terjadi di Jawa Timur dengan cara umum, sebagaimana tergambar pada data Badan Pusat Statistik (BPS) September 2024, memperlihatkan bahwasannya meskipun terjadi tren

penurunan jumlah penduduk miskin pada satu dekade terakhir, yakni dari 4,7 juta jiwa (2014) menjadi 3,98 juta jiwa (2024), namun problematika struktural kemiskinan masih menyisakan permasalahan yang signifikan, khususnya di wilayah perdesaan seperti Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Meskipun persentase kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan dengan cara makro, namun perbedaan garis kemiskinan antara wilayah kota dan desa masih memperlihatkan terdapatnya ketimpangan. Hal berikut tercermin dari garis kemiskinan per kapita per bulan di perdesaan yang lebih rendah (Rp 525.955) dibandingkan perkotaan (Rp 565.284), yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan rumah tangga dalam mencukupi kebutuhan dasar. pada konteks tersebut, rumah tangga pra-sejahtera di Desa Munggu menjadi potret nyata dari kelompok masyarakat yang berada di ambang kemiskinan absolut, sebagaimana tercermin pada data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang meraih 433 keluarga. Meskipun bantuan sosial seperti PKH sudah diupayakan selaku strategi penanggulangan kemiskinan, kenyataannya sebagian besar masyarakat masih memperlihatkan ketergantungan yang tinggi kepada bantuan pemerintah. Fenomena berikut tidak bisa dilepaskan dari konstruksi budaya kemiskinan yang diwariskan dengan cara turun-temurun, di mana bantuan dianggap selaku hak, bukan selaku sarana transisi menuju kemandirian. Oleh karena itu, penurunan angka kemiskinan dengan cara statistik belum sepenuhnya merepresentasikan perbaikan kesejahteraan dengan cara kualitatif. Program bantuan semestinya tidak hanya fokus pada aspek karitatif, namun juga memperkuat pemberdayaan berbasis lokal agar masyarakat tidak hanya bertahan pada kondisi subsisten, melainkan bisa berproses menuju kehidupan yang lebih produktif dan mandiri. Maka, penguatan kelembagaan sosial, pendidikan, dan pendampingan berbasis komunitas sangat penting agar penanggulangan kemiskinan benar-benar bisa menembus akar struktural dan kultural yang membelenggu kehidupan rumah tangga pra-sejahtera.

Dari Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi kemiskinan di Kabupaten Ponorogo pada Maret 2024 memperlihatkan terdapatnya penurunan yang cukup signifikan. Jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 16.386 jiwa ataupun setara dengan 9,11% dari total jumlah penduduk. Angka ini mengalami penurunan sejumlah 6% jika dibandingkan dengan Maret 2023 yang mencatatkan angka sejumlah 17.446 jiwa. Penurunan ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan intervensi program-program penanggulangan kemiskinan, namun juga menjadi indikator awal bahwasannya pola hidup dan strategi bertahan hidup masyarakat miskin, khususnya rumah tangga pra-sejahtera, sedang mengalami pergeseran.

Dalam konteks penelitian di Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, yang termasuk pada wilayah Kabupaten Ponorogo, data ini menjadi penting guna merefleksikan efektivitas program bantuan sosial serta memahami bagaimana budaya kemiskinan berdampak pada kemampuan rumah tangga pra-sejahtera untuk terbebas dari jerat kemiskinan struktural. Meskipun dengan cara makro persentase kemiskinan menurun, perlu ditelaah lebih pada apakah penurunan tersebut juga terjadi pada kelompok rentan seperti rumah tangga pra-sejahtera, ataupun justru mereka tetap terjebak pada pola hidup subsisten dan ketergantungan kepada bantuan pemerintah.

Garis kemiskinan yang berada pada angka Rp509.390 per kapita per bulan juga menjadi tolak ukur penting dalam menilai taraf kesejahteraan masyarakat. Nilai ini memperlihatkan bahwasannya rumah tangga dengan pengeluaran di bawah angka tersebut dikategorikan selaku miskin. Oleh karena itu, capaian penurunan kemiskinan perlu dibarengi dengan analisis kritis kepada akses, pemanfaatan, dan ketergantungan kepada program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, persebaran kemiskinan di 21 kecamatan se-Kabupaten Ponorogo, termasuk Bungkal, juga perlu dicermati karena masing-masing mempunyai karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda, yang berkontribusi kepada dinamika kemiskinan lokal.

Dengan memperhatikan indeks keparahan kemiskinan sejumlah 0,017 dan indeks kedalaman sejumlah 1,02, terlihat bahwasannya meskipun jumlah penduduk miskin menurun, kualitas kehidupan penduduk miskin yang tersisa masih berada pada kondisi rentan dan belum sepenuhnya pulih. Di sinilah pentingnya studi kualitatif tentang budaya kemiskinan, strategi bertahan hidup, serta evaluasi kepada program bantuan sosial di taraf rumah tangga, agar penurunan angka kemiskinan tidak hanya bersifat statistik semata, namun benar-benar merepresentasikan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, khususnya di desa seperti Munggu.

Berlandaskan data (Master Ansit-Ponorogo,2021) jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo tercatat sebanyak 433 keluarga. Jumlah berikut memperlihatkan bahwasannya ada ratusan keluarga di desa tersebut yang tergolong pada kategori penerima manfaat karena mencukupi kriteria. Jumlah berikut memperlihatkan bahwasannya ada ratusan keluarga di desa tersebut yang tergolong pada kategori penerima manfaat karena mencukupi kriteria. Fakta berikut mencerminkan bahwasannya kemiskinan masih menjadi permasalahan yang cukup signifikan di wilayah tersebut. Tingginya jumlah KPM menandakan terdapatnya ketergantungan kepada bantuan sosial selaku upaya pemenuhan kebutuhan dasar, serta menggambarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang

belum sepenuhnya mandiri dengan cara finansial. Hal berikut menjadi hal krusial bagi pemerintah dan pihak terkait untuk terus melaksanakan evaluasi dan penguatan kepada program penanggulangan kemiskinan agar tidak hanya bersifat kuratif, namun juga bisa mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga dengan cara berkelanjutan.

Selain peran pemerintah lewat program PKH, keberhasilan penanggulangan kemiskinan juga sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan sinergi antar pemangku kepentingan, seperti aparat desa, tenaga sosial, dan lembaga swadaya masyarakat. Di Desa Munggu, meskipun program PKH sudah berjalan selama beberapa tahun, masih ada berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program tersebut. Kendala tersebut antara lain ialah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban pada program PKH, keterbatasan akses informasi, serta hambatan pada pemanfaatan bantuan yang diberikan. Selain itu, kondisi geografis dan sosial ekonomi Desa Munggu yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian selaku petani juga mempengaruhi taraf kesejahteraan dan kemampuan keluarga dalam mencukupi kebutuhan dasar. Faktor-faktor tersebut menjadi persoalan tersendiri pada upaya menekan angka kemiskinan dengan cara substansial. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh kepada pelaksanaan PKH di desa berikut guna mengetahui seberapa besar kontribusi positif yang bisa diberikan oleh program tersebut bagi penerima manfaat.

Berlandaskan latar belakang permasalahan di atas, permasalahan kemiskinan pada rumah tangga pra-sejahtera di Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, menjadi isu yang kompleks dan mendesak untuk dikaji. Ketergantungan kepada bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah memperlihatkan terdapatnya keterbatasan kemampuan rumah tangga dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dengan cara mandiri. Hal berikut mencerminkan terdapatnya dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi strategi bertahan hidup mereka. pada konteks berikut, penelitian berikut akan berfokus pada analisis mendalam mengenai dinamika sosial dan ekonomi dialami oleh rumah tangga pra-sejahtera tersebut. Pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi sosial, strategi ekonomi, serta pengaruh bantuan sosial kepada kehidupan rumah tangga pra-sejahtera menjadi sangat penting. Oleh karena itu, penelitian berikut bertujuan guna mengungkapkan realitas sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh rumah tangga pra-sejahtera di Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketergantungan mereka pada bantuan sosial pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian berikut termasuk pada kategori penelitian kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Sumber data primer dipakai untuk pengumpulan data di penelitian ini. Berlandaskan Sugiyono (2013), subjek penelitian ialah individu, kelompok, ataupun objek yang menjadi fokus pengamatan ataupun pengumpulan data pada suatu penelitian. Subjek penelitian ialah sumber utama yang menyediakan informasi yang dibutuhkan guna menjawab pertanyaan penelitian. Subjek penelitian dipilih dengan cara purposive sampling, yakni berlandaskan pertimbangan yang relevan dengan tujuan penelitian, di mana subjek yang dipilih yaitu mereka yang dianggap mempunyai informasi mengenai program bantuan sosial serta keterlibatan pada program tersebut. Subjek penelitian berikut ialah rumah tangga pra sejahtera penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah yang berada pada kategori kemiskinan absolut.

Teknik analisis data induktif yang dipakai pada penelitian berikut ialah pendekatan kualitatif yang bertujuan guna memberikan gambaran yang mendalam tentang fenomena sosial yang terjadi di Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Tujuan analisis data pada penelitian berikut ialah guna mengetahui dinamika sosial ekonomi, taktik bertahan hidup, dan pola hidup rumah tangga pra sejahtera penerima bantuan sosial. Sugiyono (2013) menyatakan bahwasannya ada tiga langkah utama pada proses analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Desa Munggu

Desa Munggu merupakan wilayah pedesaan di Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, yang menggambarkan karakter ekonomi agraris dan struktur sosial yang khas. Secara umum, wilayah pedesaan di Indonesia masih menunjukkan tingkat kemiskinan relatif tinggi bila dibandingkan kawasan urban, karena keterbatasan akses infrastruktur, modal, serta institusi ekonomi yang kuat (urban - rural disparities remain persistent in Indonesia). Kondisi geografis yang didominasi oleh lahan pertanian juga menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga bergantung pada sektor primer untuk penghidupan, sehingga rentan terhadap perubahan musim atau produktivitas rendah.

Permukiman masyarakat di Desa Munggu tersebar mengikuti kontur lahan, dan banyak ditempati oleh keluarga dengan tingkat pendapatan rendah. Hal ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa kemiskinan di wilayah pedesaan Indonesia cenderung lebih tinggi karena asosiasi struktural antara

rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta peluang kerja formal. Infrastruktur desa yang belum merata termasuk kualitas jalan, jaringan air bersih, dan fasilitas public berdampak langsung terhadap mobilitas dan akses layanan dasar masyarakat.

Kondisi Objektif Sosial Ekonomi Rumah Tangga Pra Sejahtera di Desa Munggu

Kondisi Sosial

Kondisi sosial rumah tangga pra sejahtera di Desa Munggu tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonominya, karena keduanya saling mempengaruhi dan membentuk satu kesatuan realitas kehidupan yang kompleks. Dari sisi hunian, sebagian besar rumah tangga pra sejahtera menempati bangunan yang secara fisik masih jauh dari standar kelayakan. Banyak rumah yang lantainya belum berkeramik, dindingnya belum diplester, dan fasilitasnya masih sangat terbatas. Beberapa rumah tangga bahkan tidak memiliki fasilitas sanitasi sendiri sehingga masih harus berbagi dengan tetangga. Kondisi fisik hunian yang demikian tidak hanya mencerminkan keterbatasan ekonomi, tetapi juga mengindikasikan rendahnya akumulasi aset yang menjadi salah satu indikator utama kemiskinan secara objektif.

Dari sisi sumber daya manusia, tingkat pendidikan kepala keluarga dan pasangannya secara umum tergolong rendah. Sebagian besar hanya menamatkan pendidikan dasar atau bahkan tidak menyelesaikannya. Rendahnya tingkat pendidikan ini berdampak langsung pada sempitnya pilihan pekerjaan yang tersedia, sehingga mereka terjebak pada pekerjaan-pekerjaan di sektor informal yang berpenghasilan rendah dan tidak stabil. Keterbatasan keterampilan dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi penghalang struktural yang membuat rumah tangga pra sejahtera sulit untuk mengakses peluang ekonomi yang lebih baik, bahkan ketika peluang tersebut secara teoritis tersedia.

Pola sikap hidup tersebut tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Banyak di antara rumah tangga pra sejahtera yang mengakui bahwa kondisi kehidupan yang mereka jalani sekarang tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh orang tua mereka dahulu. Orang tua mereka juga petani, juga hidup dalam keterbatasan yang sama, dan juga mewariskan pola pikir serta cara pandang yang serupa dalam menghadapi kemiskinan. Proses pewarisan nilai dan pola hidup inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi terbentuknya budaya kemiskinan yang mengakar kuat di tengah masyarakat pra sejahtera Desa Munggu.

Ikatan sosial di antara warga yang memiliki kondisi serupa masih terpelihara dengan cukup baik. Hubungan sosial yang bersifat informal seperti saling meminjam kebutuhan dapur, gotong royong dalam kegiatan kampung, dan saling berbagi informasi mengenai program bantuan pemerintah menjadi jaring pengaman sosial yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Solidaritas sosial ini memiliki fungsi penting sebagai mekanisme penyangga yang membantu rumah tangga pra sejahtera bertahan di tengah berbagai tekanan ekonomi yang tidak menentu, meskipun tidak cukup untuk mengangkat kondisi mereka keluar dari kemiskinan secara struktural.

Kondisi Ekonomi

Kehidupan ekonomi rumah tangga pra sejahtera di Desa Munggu secara umum ditandai oleh ketidakstabilan pendapatan yang kronis. Hampir seluruh rumah tangga menggantungkan sumber penghidupan pada sektor informal yang sangat rentan terhadap faktor eksternal, baik berupa kondisi alam, musim, maupun fluktuasi pasar. Bagi mereka yang berprofesi sebagai petani, besarnya pendapatan sepenuhnya ditentukan oleh hasil panen yang tidak dapat diprediksi dari satu musim ke musim berikutnya. Ketika panen berhasil, kebutuhan dasar keluarga dapat terpenuhi dengan relatif layak. Berbeda dengan ketika hasil panen menurun akibat cuaca buruk, serangan hama, atau anjloknya harga jual di pasar, kondisi ekonomi keluarga dapat terpuruk dalam waktu singkat tanpa ada cadangan yang cukup untuk bertahan.

Kondisi serupa juga dialami oleh mereka yang bergantung pada pekerjaan serabutan, usaha kecil-kecilan, maupun kiriman dari anggota keluarga yang bekerja di luar daerah. Pendapatan yang diperoleh bersifat tidak tetap, tidak teratur, dan seringkali tidak sebanding dengan kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan setiap harinya. Tidak ada jaminan bahwa setiap bulan akan ada pemasukan dalam jumlah yang sama, sehingga rumah tangga pra sejahtera selalu berada dalam kondisi ketidakpastian finansial yang berkepanjangan.

Akibat ketidakstabilan pendapatan tersebut, pola pengeluaran rumah tangga pra sejahtera cenderung berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek semata. Prioritas utama selalu tertuju pada kebutuhan pangan sehari-hari, seperti beras, minyak goreng, dan bahan dapur lainnya. Kebutuhan lain yang tidak bersifat mendesak seringkali ditunda, dikurangi, atau bahkan diabaikan sepenuhnya. Kemampuan untuk menabung, berinvestasi, maupun merencanakan pengeluaran jangka panjang hampir tidak ada, karena pendapatan yang masuk langsung habis untuk menutup kebutuhan yang paling mendasar.

Dalam menghadapi tekanan ekonomi yang terus-menerus ini, sebagian besar rumah tangga pra sejahtera berupaya mengembangkan sumber pemasukan alternatif sebagai strategi bertahan hidup. Bentuk strategi ini bervariasi, mulai dari memelihara ternak sebagai bentuk tabungan yang dapat dicairkan

sewaktu-waktu, memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam tanaman konsumsi dan budidaya ikan, menjalankan usaha kecil penjualan kebutuhan pokok di rumah, hingga mengerjakan pekerjaan sampingan yang menghasilkan produk sederhana untuk dijual ke pengepul. Meskipun strategi-strategi tersebut menunjukkan adanya kreativitas dan kemampuan adaptif, hasilnya tetap tidak mampu mengangkat kondisi ekonomi keluarga secara signifikan. Pemasukan yang diperoleh dari sumber-sumber alternatif ini umumnya sangat kecil, tidak stabil, dan hanya berfungsi sebagai penyangga sementara ketika sumber pendapatan utama sedang tidak menghasilkan.

Dalam konteks ini, bantuan sosial dari pemerintah berupa PKH, BLT, dan bantuan kesejahteraan (Kesra) memainkan peran yang sangat penting sebagai penopang keberlangsungan hidup rumah tangga pra sejahtera. Bantuan yang diterima secara konsisten dimanfaatkan untuk memenuhi dua kebutuhan utama, yakni kebutuhan konsumsi pokok dan kebutuhan pendidikan anak. Keberadaan bantuan sosial ini memberikan sedikit ruang bernapas bagi keluarga yang penghasilannya tidak menentu, sehingga kebutuhan dasar minimal dapat tetap terpenuhi meskipun kondisi ekonomi sedang dalam tekanan. Namun demikian, bantuan yang diterima tidak dirancang sebagai modal pemberdayaan ekonomi, melainkan lebih bersifat karitatif dan jangka pendek. Akibatnya, meskipun bantuan sosial memberikan dampak positif dalam jangka pendek, kondisi struktural kemiskinan yang dialami rumah tangga pra sejahtera tidak mengalami perubahan yang berarti.

Kondisi Fisik Hunian

Kondisi fisik rumah tangga pra sejahtera di Desa Munggu mencerminkan secara nyata tingkat kesejahteraan yang masih sangat terbatas. Dari sisi hunian, sebagian besar rumah tangga menempati bangunan yang secara fisik masih jauh dari standar kelayakan hunian yang layak. Banyak rumah yang lantainya belum berkeramik dan masih berupa tanah atau semen kasar, dindingnya belum diplester sehingga tampak masih berupa susunan bata atau batako terbuka, serta atapnya menggunakan material sederhana yang seadanya. Kondisi fisik bangunan yang demikian bukan semata-mata persoalan estetika, melainkan mencerminkan ketidakmampuan rumah tangga dalam berinvestasi pada aset hunian yang lebih layak akibat pendapatan yang tidak pernah surplus. Lewis menyebut bahwa salah satu penanda budaya kemiskinan pada dimensi komunitas adalah hunian yang sesak dan tidak layak yang kemudian membentuk pola interaksi sosial, batasan privasi, dan cara pandang tentang hak atas ruang hidup. Berdasarkan sudut pandang Lewis tersebut, kondisi fisik hunian di Desa Munggu bukan hanya cerminan keterbatasan ekonomi, tetapi juga membentuk habitus yang mereproduksi cara pandang tentang kelayakan hidup minimum yang dianggap "sudah cukup".

Dari sisi fasilitas sanitasi dan kebersihan, sebagian rumah tangga belum memiliki kamar mandi dan fasilitas WC sendiri, sehingga masih harus berbagi dengan tetangga sekitar. Keterbatasan akses terhadap fasilitas sanitasi dasar ini berimplikasi langsung pada kualitas kesehatan dan kebersihan anggota keluarga, terutama anak-anak yang berada dalam masa pertumbuhan. Meskipun demikian, kondisi tersebut diterima begitu saja oleh sebagian besar rumah tangga sebagai bagian dari realitas kehidupan yang memang demikian adanya, tanpa ada upaya sistematis untuk mengubahnya dalam waktu dekat.

Dari sisi kepemilikan aset fisik produktif, sebagian besar rumah tangga pra sejahtera hanya memiliki aset dalam jumlah dan nilai yang sangat terbatas. Beberapa rumah tangga memiliki lahan pertanian yang sempit dengan status kepemilikan yang tidak selalu jelas, sementara sebagian lainnya sama sekali tidak memiliki lahan dan hanya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh tani di lahan milik orang lain. Kepemilikan alat produksi pertanian pun sangat sederhana dan terbatas pada peralatan tradisional yang nilai ekonominya rendah. Keterbatasan aset produktif ini menjadi salah satu hambatan terbesar bagi rumah tangga pra sejahtera untuk meningkatkan kapasitas produksinya dan keluar dari jebakan kemiskinan.

Kondisi fisik hunian dan lingkungan sekitar juga berkaitan erat dengan kondisi kesehatan anggota keluarga. Rumah tangga yang tinggal dalam hunian sempit, dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang kurang memadai, serta fasilitas sanitasi yang terbatas, lebih rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan. Biaya pengobatan yang muncul akibat sakit menjadi beban tambahan yang kerap mengguncang kestabilan keuangan rumah tangga, terutama karena mayoritas anggota keluarga mengandalkan kepesertaan jaminan kesehatan dari program pemerintah sebagai satu-satunya akses terhadap layanan medis. Ketika jaminan kesehatan tidak mencakup seluruh kebutuhan pengobatan, rumah tangga terpaksa menggunakan dana yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan pokok lainnya.

Praktik Kebudayaan Kemiskinan Rumah Tangga Pra Sejahtera Sikap Pasrah dan Fatalistik

Salah satu praktik kebudayaan kemiskinan yang paling dominan dan paling mudah diamati dalam kehidupan rumah tangga pra sejahtera di Desa Munggu adalah sikap pasrah dan fatalistik dalam menghadapi kondisi hidup yang serba terbatas. Sikap ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk secara perlahan melalui pengalaman hidup yang panjang dalam keterbatasan yang terus

berulang tanpa ada perubahan yang berarti dari waktu ke waktu. Ketika seseorang sudah terlalu lama hidup dalam kondisi yang sama dari tahun ke tahun, dari satu musim ke musim berikutnya, tanpa pernah merasakan ada titik terang yang benar-benar mengubah keadaan secara signifikan, maka kemiskinan perlahan-lahan berhenti menjadi sesuatu yang dirasakan sebagai masalah dan mulai diterima sebagai kondisi yang memang sudah seharusnya demikian adanya. Pada titik inilah sikap pasrah mulai mengakar dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cara pandang seseorang terhadap kehidupannya sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari, sikap fatalistik ini tercermin dari cara rumah tangga pra sejahtera memandang dan merespons berbagai kesulitan yang mereka hadapi. Ketika hasil panen gagal, ketika penghasilan tidak mencukupi, atau ketika kebutuhan mendesak datang tanpa ada dana yang tersedia, respons yang muncul bukanlah upaya sistematis untuk mencari jalan keluar secara aktif dan terencana, melainkan penerimaan terhadap keadaan yang dijalani dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kemiskinan tidak lagi dipandang sebagai kondisi yang harus diperjuangkan untuk diubah secara serius, melainkan sebagai bagian dari jalan hidup yang memang sudah ditetapkan dan hanya bisa dijalani sebaik mungkin dalam batas-batas keterbatasan yang ada. Orientasi hidup yang demikian secara langsung melemahkan dorongan internal untuk melakukan perubahan, berinovasi, atau mengambil risiko demi memperbaiki kondisi ekonomi keluarga secara lebih mendasar. Lewis secara spesifik menyebut *fatalism* dan *helplessness* sebagai karakteristik individu dalam budaya kemiskinan. Lewis tidak memandang sikap pasrah dan fatalistik sebagai kelemahan moral, melainkan sebagai respons adaptif rasional terhadap kondisi yang secara obyektif memang tidak memberikan peluang nyata. Sikap pasrah warga pra sejahtera di Desa Munggu dapat dibaca dalam dua lapis yakni sebagai adaptasi psikologis yang membantu mereka bertahan, dan sebagai mekanisme reproduksi yang secara tidak disengaja mengunci mereka dalam kondisi yang sama.

Sikap pasrah ini juga tampak jelas dalam cara rumah tangga pra sejahtera merespons berbagai program dan peluang yang datang dari luar komunitas mereka. Keterlibatan dalam program pemberdayaan atau peningkatan kapasitas ekonomi tidak selalu disambut dengan antusias dan penuh semangat, karena sebagian besar dari mereka sudah memiliki keyakinan yang tertanam kuat bahwa kondisi hidup mereka tidak akan banyak berubah bagaimanapun usaha yang dilakukan. Pengalaman bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan tanpa ada perubahan yang berarti telah membentuk keyakinan bahwa kemiskinan adalah sesuatu yang permanen dan sulit untuk diatasi, bukan sesuatu yang bersifat sementara dan dapat diubah melalui usaha yang sungguh-sungguh.

Sikap pasrah dan fatalistik ini juga memengaruhi cara rumah tangga pra sejahtera memandang diri mereka sendiri dalam konteks kehidupan sosial yang lebih luas. Banyak di antara mereka yang sudah tidak lagi membayangkan kemungkinan untuk hidup dalam kondisi yang berbeda secara signifikan dari yang mereka jalani sekarang. Keterbatasan bukan lagi dipandang sebagai hambatan yang harus diatasi, melainkan sebagai batas-batas alami yang mendefinisikan ruang gerak kehidupan mereka. Perasaan tidak berdaya yang sudah mengakar dalam diri ini menjadi salah satu hambatan terbesar yang membuat kemiskinan terus berlangsung dari generasi ke generasi, bukan semata-mata karena tidak tersedianya sumber daya dari luar, tetapi karena tidak adanya keyakinan dari dalam diri bahwa sumber daya tersebut dapat benar-benar mengubah keadaan menjadi lebih baik. Lewis juga menekankan bahwa pada usia 6–7 tahun, anak-anak yang tumbuh dalam budaya kemiskinan sudah menyerap nilai-nilai dasarnya dan sangat sulit untuk berubah hanya melalui intervensi ekonomi semata. Implikasinya pada temuan ini adalah program penanggulangan kemiskinan yang hanya berfokus pada transfer tunai tanpa menyentuh dimensi psikologis dan kultural tidak akan cukup efektif.

Temuan terkait sikap pasrah dan fatalistik dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian Johan Arifin serta Yuniar Christy Aryani (2020) yang menunjukkan bahwa masyarakat miskin cenderung menerima kondisi yang dialami sebagai takdir dan bagian dari kehidupan sehari-hari. Temuan ini juga menguatkan konsep budaya kemiskinan yang dikemukakan oleh Oscar Lewis. Adapun perbedaannya, penelitian ini menekankan bahwa sikap pasrah tidak berhenti pada tataran nilai atau cara pandang, tetapi berpengaruh langsung terhadap rendahnya inisiatif untuk melakukan perubahan serta minimnya keterlibatan dalam program pemberdayaan. Kondisi tersebut pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya keluar dari kemiskinan.

Orientasi Hidup Jangka Pendek

Praktik kebudayaan kemiskinan berikutnya yang sangat menonjol dalam kehidupan rumah tangga pra sejahtera di Desa Munggu adalah orientasi hidup yang bersifat jangka pendek. Pola pikir dan tindakan ekonomi rumah tangga pra sejahtera hampir sepenuhnya terpusat pada pemenuhan kebutuhan hari ini, paling jauh hingga akhir pekan ini, tanpa ada perencanaan yang menjangkau bulan atau tahun ke depan secara lebih terstruktur dan sistematis. Seluruh energi, perhatian, dan sumber daya yang tersedia dihabiskan untuk memastikan bahwa kebutuhan paling dasar hari ini dapat terpenuhi, sehingga tidak ada ruang tersisa untuk memikirkan masa depan secara lebih strategis dan terencana dengan baik. Hal tersebut

sesuai dengan salah satu ciri utama dari identifikasi Oscar Lewis yaitu ketidakmampuan untuk menunda kepuasan dan merencanakan masa depan. Menurut Lewis, kondisi ini bukan cerminan watak atau karakter personal, melainkan konsekuensi struktural yang lahir dari ketidakpastian pendapatan yang terus berulang tanpa ada titik kepastian yang bisa dipegang.

Orientasi jangka pendek ini pada dasarnya bukan merupakan pilihan bebas yang dibuat secara sadar oleh rumah tangga pra sejahtera, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari kondisi pendapatan yang tidak menentu dan tidak dapat diprediksi dari waktu ke waktu. Ketika seseorang tidak pernah tahu berapa yang akan diterimanya bulan depan atau bahkan minggu depan, maka perencanaan jangka panjang terasa tidak hanya sulit secara teknis tetapi juga tidak relevan dengan kenyataan hidup yang dihadapi sehari-hari. Sumber daya yang ada harus segera digunakan untuk menutup kebutuhan yang paling mendesak, karena tidak ada kepastian bahwa di kemudian hari akan ada sumber daya lain yang tersedia dalam jumlah yang cukup. Pola ini menciptakan siklus yang terus berulang tanpa henti, di mana ketidakpastian pendapatan mendorong orientasi jangka pendek, dan orientasi jangka pendek pada gilirannya menghambat terbentuknya tabungan, investasi, serta strategi ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada masa depan.

Kondisi ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa hampir tidak ada mekanisme formal yang memfasilitasi rumah tangga pra sejahtera untuk mulai berpikir dan bertindak dalam kerangka jangka panjang. Akses terhadap lembaga keuangan formal seperti bank atau koperasi sangat terbatas, baik karena kendala administratif maupun karena tidak adanya aset yang dapat dijadikan jaminan. Tidak adanya wadah yang memungkinkan mereka untuk menabung, merencanakan, atau berinvestasi secara terstruktur membuat orientasi jangka pendek semakin terkukuhkan sebagai satu-satunya cara yang mungkin untuk mengelola ekonomi rumah tangga dalam kondisi yang ada. Lewis mengkaji bahwa masyarakat dalam budaya kemiskinan juga dicirikan oleh ketidakikutsertaan dalam institusi utama masyarakat termasuk lembaga keuangan formal, partai politik, dan serikat buruh. Keterbatasan akses terhadap bank dan koperasi di Desa Munggu bukan semata kendala administratif, tetapi juga mencerminkan alienasi struktural berdasarkan teori Oscar Lewis yaitu sebagai ciri dimensi pertama budaya kemiskinan (hubungan dengan masyarakat luas).

Dalam jangka panjang, orientasi hidup yang terpusat pada kebutuhan sesaat ini berdampak sangat signifikan terhadap kemampuan rumah tangga pra sejahtera untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Tanpa tabungan, tidak ada cadangan finansial yang dapat dimanfaatkan ketika kondisi darurat datang secara tiba-tiba seperti sakit, gagal panen, atau kebutuhan mendesak lainnya. Tanpa investasi pada diri sendiri maupun pada usaha yang dijalankan, tidak ada peningkatan kapasitas produksi yang dapat mendorong pendapatan lebih tinggi di masa mendatang. Dan tanpa perencanaan jangka panjang yang terstruktur, tidak ada peta jalan yang dapat memandu rumah tangga menuju kondisi ekonomi yang lebih stabil, mandiri, dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan dari luar.

Kondisi ini menjadikan rumah tangga pra sejahtera terus berada dalam lingkaran yang sama dari waktu ke waktu, menghadapi tekanan ekonomi yang berulang tanpa bekal yang cukup untuk keluar dari tekanan tersebut secara permanen. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan penelitian Ahmad Rizaldi (2017) yang menyebutkan bahwa rumah tangga miskin umumnya menerapkan strategi bertahan hidup dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui penghematan atau "ikat pinggang". Perbedaannya, dalam penelitian ini orientasi jangka pendek tidak hanya dipahami sebagai strategi sementara, tetapi telah berkembang menjadi pola pikir yang mengakar. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi ketidakpastian ekonomi yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga menyulitkan individu maupun rumah tangga untuk menyusun perencanaan jangka panjang.

Ketergantungan Pada Bantuan Sosial

Praktik kebudayaan kemiskinan yang juga sangat kuat terlihat dalam kehidupan rumah tangga pra sejahtera di Desa Munggu adalah ketergantungan yang mendalam terhadap bantuan sosial dari pemerintah. Program-program seperti PKH, BLT, dan bantuan kesejahteraan (Kesra) yang pada dasarnya dirancang sebagai instrumen sementara untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin dan mendorong tumbuhnya kemandirian secara bertahap, dalam praktiknya telah bergeser fungsinya menjadi sumber penghidupan utama yang dinantikan secara rutin oleh sebagian besar rumah tangga pra sejahtera.

Bantuan sosial tidak lagi dipandang sebagai jembatan menuju kemandirian ekonomi yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam jangka waktu tertentu, melainkan telah bertransformasi menjadi hak yang memang seharusnya diterima secara terus-menerus selama kondisi ekonomi keluarga belum mengalami perubahan yang berarti. Dalam teori Oscar Lewis tidak secara langsung disebutkan mengenai ketergantungan pada bantuan negara, karena penelitiannya dilakukan di konteks masyarakat yang justru tidak mendapat bantuan. Konsep tersebut dapat ketika bantuan sosial datang tanpa disertai integrasi nyata ke dalam struktur ekonomi produktif, hal tersebut dapat memperkuat kondisi marjinalisasi yang menjadi

fondasi budaya kemiskinan. Warga tetap berada di luar arus utama ekonomi meskipun menerima transfer tunai.

Pola ketergantungan ini terbentuk bukan semata-mata karena kurangnya motivasi atau kemauan dari pihak penerima manfaat, melainkan karena kondisi ekonomi struktural yang memang membuat keluarga tidak punya pilihan lain selain mengandalkan bantuan tersebut sebagai penopang utama. Ketika pendapatan dari pekerjaan utama tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari, bantuan sosial menjadi satu-satunya sumber yang dapat diandalkan secara rutin dan relatif pasti.

Dari waktu ke waktu, ketergantungan ini semakin menguat dan semakin dalam seiring dengan lamanya seseorang berstatus sebagai penerima manfaat. Keluarga yang sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun menerima bantuan sosial secara konsisten mulai menyesuaikan seluruh pola pengeluaran dan perencanaan rumah tangganya dengan siklus pencairan bantuan, sehingga ketika bantuan terlambat dicairkan atau jumlahnya dikurangi, seluruh keseimbangan ekonomi keluarga langsung terguncang secara signifikan.

Dalam konteks ini bukan sekadar ketergantungan itu sendiri sebagai sebuah fakta, melainkan cara pandang yang menyertai dan memperkuat ketergantungan tersebut dalam jangka panjang. Bantuan sosial yang diterima hampir seluruhnya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi jangka pendek seperti membeli beras, minyak goreng, kebutuhan dapur, dan perlengkapan sekolah anak, bukan untuk modal usaha, pengembangan keterampilan, atau bentuk investasi lain yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Tidak ada upaya yang sistematis untuk mengalokasikan sebagian dari bantuan yang diterima sebagai modal awal yang dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan baru di luar sektor pertanian tradisional.

Hal ini mencerminkan bahwa kerangka berpikir yang dominan dalam pemanfaatan bantuan sosial masih sepenuhnya terpusat pada pemenuhan kebutuhan sesaat, bukan pada pemanfaatan bantuan sebagai batu loncatan yang dapat membawa keluarga menuju kondisi yang lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi dalam jangka panjang.

Ketergantungan terhadap bantuan sosial ini juga secara tidak langsung memperkuat sikap pasrah yang sudah ada sebelumnya. Ketika keluarga sudah terbiasa mengandalkan bantuan dari luar sebagai penopang utama, inisiatif untuk mencari dan mengembangkan sumber penghidupan secara mandiri menjadi semakin lemah. Bantuan yang datang secara rutin tanpa disertai dengan program pemberdayaan yang bermakna justru dapat memperkuat keyakinan bahwa kondisi yang ada tidak perlu dan tidak mungkin diubah secara signifikan melalui usaha sendiri.

Pada akhirnya, ketergantungan ini tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga telah menjadi bagian dari cara hidup dan cara pandang yang membentuk identitas rumah tangga pra sejahtera dalam memposisikan diri mereka di tengah struktur sosial yang ada. Hal tersebut berkaitan dengan ciri Lewis tentang lemahnya kesadaran kelas dan partisipasi kolektif. Ketika individu sudah terbiasa menerima dari luar dan tidak membangun organisasi atau gerakan kolektif untuk memperbaiki kondisi bersama, budaya kemiskinan semakin mengakar. Di Desa Munggu, tidak tampak adanya organisasi ekonomi mandiri seperti koperasi warga atau kelompok usaha bersama yang tumbuh dari inisiatif masyarakat sendiri melainkan sebuah kekosongan yang Lewis prediksi akan muncul dalam budaya kemiskinan.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Sugeng Harianto (2020) yang menyebutkan bahwa program bantuan sosial cenderung bersifat jangka pendek dan karitatif, serta penelitian Ema Fitri Lubis (2020) yang menunjukkan bahwa bantuan sosial belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan sosial tidak hanya kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan, tetapi juga memunculkan ketergantungan yang cukup kuat, baik secara ekonomi maupun kultural. Dalam kondisi tersebut, bantuan mulai dipandang sebagai sumber utama penghidupan, bukan lagi sebagai sarana untuk mendorong kemandirian.

Pewarisan Kemiskinan Antar Generasi

Salah satu aspek paling krusial dari praktik kebudayaan kemiskinan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah terjadinya pewarisan kemiskinan secara antargenerasi yang berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan. Kemiskinan yang dialami oleh rumah tangga pra sejahtera di Desa Munggu bukan merupakan fenomena yang muncul secara tiba-tiba dalam satu generasi tertentu, melainkan merupakan kondisi yang sudah berlangsung lama dan diteruskan dari orang tua kepada anak, dalam sebuah siklus yang terus berputar tanpa ada mekanisme yang cukup kuat untuk memutusnya secara tuntas. Pewarisan ini tidak terjadi melalui proses yang disengaja atau direncanakan secara sadar, melainkan berlangsung secara halus dan hampir tidak terasa melalui pembiasaan sehari-hari, internalisasi nilai-nilai, dan pembentukan cara pandang terhadap kehidupan yang berlangsung sejak masa kanak-kanak dalam lingkungan yang serba terbatas.

Anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga pra sejahtera sejak usia dini sudah terpapar secara langsung pada realitas keterbatasan yang menjadi keseharian mereka. Mereka menyaksikan bagaimana

orang tua berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dari hari ke hari, bagaimana keputusan ekonomi selalu harus dibuat dalam kerangka keterbatasan yang sangat sempit tanpa banyak pilihan yang tersedia, dan bagaimana sikap menerima serta penyesuaian diri terhadap kondisi yang ada menjadi respons utama yang ditampilkan dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Secara tidak langsung dan tanpa disadari, anak-anak menyerap pola pikir, sistem nilai, dan cara hidup yang sama dari lingkungan keluarga dan komunitas di sekitar mereka, sehingga ketika mereka dewasa dan mulai membentuk keluarga sendiri, mereka cenderung mereproduksi kondisi dan pola kehidupan yang tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh orang tua mereka sebelumnya. Argumen Lewis dalam *Five Families* (1959) relevan dengan keadaan di Desa Munggu yakni mendeskripsikan secara etnografis bagaimana anak-anak dalam keluarga miskin Meksiko belajar tentang kemiskinan bukan dari ceramah, melainkan dari ritme kehidupan sehari-hari seperti kapan makan, bagaimana reaksi orang tua saat uang habis, apa yang dianggap mewah dan apa yang dianggap normal.

Proses pewarisan kemiskinan antargenerasi ini diperparah oleh terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, dan peluang mobilitas sosial yang tersedia di lingkungan pedesaan seperti Desa Munggu. Minimnya infrastruktur ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian tradisional, serta lemahnya kelembagaan lokal yang dapat mendukung pengembangan kapasitas masyarakat menjadi faktor-faktor struktural yang mempersulit terjadinya perubahan antargenerasi yang berarti.

Meskipun hampir seluruh rumah tangga pra sejahtera yang diteliti menunjukkan komitmen dan harapan yang kuat agar anak-anaknya dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi dan memiliki kehidupan yang lebih baik, struktur kesempatan yang tersedia di lingkungan mereka tetap sangat terbatas sehingga harapan tersebut seringkali tidak terwujud sebagaimana yang diinginkan.

Penurunan Ekspektasi Hidup

Praktik kebudayaan kemiskinan yang turut memperkuat dan melanggengkan siklus kemiskinan di Desa Munggu adalah terjadinya penurunan ekspektasi hidup secara sistematis dan bertahap di kalangan rumah tangga pra sejahtera. Setelah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun hidup dalam keterbatasan yang tidak kunjung berubah secara signifikan, sebagian besar rumah tangga pra sejahtera secara perlahan-lahan menyesuaikan ukuran keberhasilan, standar kebahagiaan, dan gambaran kehidupan yang ideal sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh kondisi kemiskinan yang mereka alami.

Standar kesejahteraan yang semula mungkin lebih tinggi dan lebih ambisius perlahan-lahan diturunkan hingga mencapai titik yang paling minimal dan paling mudah dicapai, yaitu sekadar dapat makan setiap hari, anak masih dapat bersekolah meskipun dengan segala keterbatasannya, dan seluruh anggota keluarga tetap dalam keadaan sehat.

Penurunan ekspektasi hidup ini pada satu sisi memang dapat dipandang sebagai bentuk ketangguhan dan kemampuan adaptasi psikologis yang luar biasa, yang memungkinkan rumah tangga pra sejahtera untuk tetap merasa cukup, bersyukur, dan mampu menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih tenang meskipun berada dalam keterbatasan yang objektif dan nyata. Kemampuan untuk menemukan makna, kebahagiaan, dan rasa syukur dalam hal-hal yang sederhana mencerminkan kekuatan mental dan spiritual yang sesungguhnya tidak dapat diremehkan begitu saja.

Nilai-nilai seperti kesederhanaan, keikhlasan, dan rasa syukur yang tumbuh dari pengalaman hidup dalam keterbatasan merupakan kekayaan kultural tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari identitas masyarakat pra sejahtera. Kondisi tersebut relevan dengan emuan Lewis yang dikritik oleh Valentine (1968) dan Goode & Eames (1996) karena dianggap menyalahkan korban (*blaming the victim*) seolah budaya kemiskinan adalah masalah internal masyarakat miskin, bukan produk dari struktur yang menindas. Penurunan ekspektasi hidup di Desa Munggu dapat dibaca dengan dua cara yakni patologi kultural menurut Lewis yang perlu diubah dan secara kritis sebagai kearifan adaptif yang rasional mengingat ketiadaan peluang nyata.

Penurunan ekspektasi ini juga membawa konsekuensi yang sangat serius dan tidak dapat diabaikan terhadap kemungkinan terjadinya perubahan dan peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang. Ketika seseorang sudah merasa cukup dengan kondisi minimalis yang ada dan tidak lagi membayangkan kemungkinan untuk hidup dalam kondisi yang berbeda secara signifikan, maka dorongan untuk berusaha lebih keras, mengambil risiko yang diperhitungkan secara matang, atau secara aktif mencari peluang-peluang baru yang dapat mengubah keadaan menjadi sangat lemah dan hampir tidak ada.

Ambisi untuk memperbaiki kondisi hidup secara lebih mendasar perlahan-lahan terkikis dan digantikan oleh rasa syukur atas apa yang sudah ada, yang meskipun secara moral sangat mulia dan patut dihargai, secara sosial-ekonomi justru berpotensi mengunci seseorang dalam kondisi kemiskinan yang sama untuk waktu yang sangat lama bahkan seumur hidup.

Kemiskinan tidak lagi dirasakan sebagai kondisi yang menyiksa dan mendesak untuk segera diubah dengan sungguh-sungguh, melainkan secara perlahan telah menjadi bagian dari identitas, cara hidup, dan

cara memandang dunia yang sudah terasa akrab, dapat diprediksi, dan dalam batas-batas tertentu bahkan terasa nyaman karena sudah sangat dikenal. Ketika kemiskinan sudah mencapai titik ini, yaitu ketika ia tidak lagi dirasakan sebagai masalah yang harus dipecahkan melainkan sebagai kondisi yang wajar untuk diterima, maka upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang datang dari luar pun akan menghadapi permasalahan yang jauh lebih besar dan lebih kompleks dari sekadar persoalan kekurangan sumber daya material.

Temuan dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Syamsu Nujum (2018) yang menunjukkan bahwa masyarakat miskin cenderung memandang kemiskinan sebagai kondisi yang wajar dan tidak dipersoalkan secara serius. Perbedaannya, penelitian ini menyoroti bahwa penurunan ekspektasi hidup tidak hanya berkaitan dengan cara pandang, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk adaptasi psikologis. Sikap tersebut membantu individu untuk tetap bertahan dalam situasi keterbatasan dengan mengurangi tekanan dan rasa kecewa terhadap kondisi yang dihadapi. Di sisi lain, kondisi ini juga berdampak pada melemahnya dorongan untuk melakukan perubahan, karena harapan yang rendah membuat upaya perbaikan hidup tidak lagi menjadi prioritas. Akibatnya, penurunan ekspektasi hidup tidak hanya berperan sebagai strategi bertahan, tetapi juga menjadi faktor yang turut menghambat terjadinya mobilitas sosial dan perbaikan kondisi ekonomi.

Pola Dominan: Ketergantungan pada Bantuan Sosial dan Sikap Pasrah sebagai Kebudayaan Kemiskinan

Dari kelima praktik kebudayaan kemiskinan yang diuraikan di atas, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada bantuan sosial dan sikap pasrah/fatalistik merupakan pola yang paling dominan, bukan karena keduanya paling sering disebutkan, melainkan karena keduanya saling menguatkan dan menjadi simpul yang menghubungkan tiga praktik lainnya, orientasi jangka pendek, pewarisan kemiskinan antargenerasi, serta penurunan ekspektasi hidup, sehingga terbentuk satu lingkaran yang saling mengunci.

Sikap pasrah membuat bantuan sosial diterima sebagai penyelesaian permanen, sementara pola penyaluran bantuan yang karitatif dan tidak disertai pemberdayaan berkelanjutan (lihat sub-bab D) memperkuat kembali sikap pasrah tersebut. Perlu ditegaskan bahwa nexus ini tidak dapat dibaca semata sebagai patologi kultural rumah tangga pra sejahtera. Ketidadaan akses terhadap lembaga keuangan formal, sempitnya lapangan kerja non-pertanian, serta desain program bantuan sosial yang berorientasi karitatif dan bukan pemberdayaan merupakan kondisi struktural yang mendahului dan memproduksi pola budaya tersebut. Dengan demikian, kebudayaan kemiskinan di Desa Munggu lebih tepat dipahami sebagai respons adaptif terhadap kemiskinan struktural, sejalan dengan pembacaan kritis atas teori Lewis, dan bukan sebagai akar penyebab kemiskinan yang berdiri sendiri.

Strategi Adaptif Rumah Tangga Pra Sejahtera dalam Menghadapi Kemiskinan

Sebelum menguraikan temuan, perlu ditegaskan bahwa respons rumah tangga pra sejahtera terhadap kemiskinan tidak dapat diperlakukan sebagai satu kategori tunggal yang seluruhnya bersifat adaptif. Literatur mengenai strategi bertahan hidup rumah tangga miskin (Davies, 1996; Moser, 1998) membedakan strategi coping, yaitu respons reaktif dan berorientasi jangka pendek yang bertujuan sekadar bertahan hidup tanpa mengubah basis aset atau pendapatan, dari strategi adaptif, yaitu respons proaktif dan berorientasi jangka panjang yang bertujuan memperluas atau mengubah basis penghidupan secara struktural. Berdasarkan pembedaan tersebut, dari lima bentuk respons yang ditemukan dalam penelitian ini, hanya diversifikasi mata pencaharian yang memenuhi kriteria strategi adaptif. Empat bentuk lainnya secara konseptual tergolong strategi coping. Pemetaan ini konsisten dengan kesimpulan penelitian (BAB VII) yang menegaskan bahwa sebagian besar respons rumah tangga pra sejahtera bersifat reaktif, bukan proaktif.

Strategi Adaptif (Proaktif, Berorientasi Mengubah Basis Penghidupan)

Diversifikasi Mata Pencaharian

Salah satu strategi adaptif yang paling nyata dan paling konsisten ditemukan dalam kehidupan rumah tangga pra sejahtera di Desa Munggu adalah upaya diversifikasi mata pencaharian sebagai respons terhadap ketidakpastian pendapatan yang menjadi ciri utama kehidupan ekonomi mereka. Ketergantungan pada satu sumber penghasilan saja dinilai sangat berisiko, mengingat sumber penghasilan utama yang dimiliki sebagian besar rumah tangga pra sejahtera yakni sektor pertanian tradisional dan pekerjaan serabutan memiliki tingkat ketidakstabilan yang sangat tinggi dan sangat rentan terhadap perubahan kondisi eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, secara alamiah rumah tangga pra sejahtera terdorong untuk mencari dan mengembangkan sumber-sumber pemasukan alternatif yang dapat berfungsi sebagai penyangga ketika sumber utama sedang tidak menghasilkan.

Bentuk diversifikasi yang dilakukan sangat beragam dan sangat kontekstual, menyesuaikan dengan sumber daya, keterampilan, dan peluang yang tersedia di lingkungan sekitar masing-masing rumah tangga. Sebagian rumah tangga memilih untuk memelihara ternak seperti ayam, kambing, atau lele sebagai

sumber penghasilan tambahan sekaligus sebagai bentuk tabungan non-tunai yang dapat dicairkan sewaktu-waktu ketika kebutuhan mendesak datang. Ternak yang dipelihara tidak dijual secara rutin, melainkan disimpan dan baru dijual ketika ada kebutuhan besar yang tidak dapat dipenuhi dari penghasilan harian, seperti menjelang tahun ajaran baru, ketika biaya sekolah anak meningkat, atau ketika hasil panen sedang mengecewakan. Strategi ini mencerminkan pemahaman intuitif yang sangat mendalam tentang manajemen risiko dalam konteks keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal.

Sebagian rumah tangga lainnya memilih untuk mengembangkan keterampilan tertentu yang dapat menghasilkan produk yang dapat dijual, seperti membuat kerajinan tangan sederhana yang kemudian dijual kepada pengepul. Pekerjaan semacam ini dilakukan di sela-sela pekerjaan utama sebagai petani, memanfaatkan waktu luang yang ada agar tetap produktif secara ekonomi meskipun dalam skala yang sangat kecil. Ada pula yang menjalankan usaha perdagangan kecil-kecilan di rumah dengan menjual kebutuhan pokok sehari-hari kepada tetangga sekitar, atau memproduksi dan menjual produk olahan sederhana seperti bumbu masakan di pasar desa. Meskipun skala usaha ini sangat kecil dan margin keuntungannya sangat tipis, keberadaannya tetap memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam menopang keberlangsungan ekonomi rumah tangga, terutama pada saat-saat ketika pendapatan dari sektor pertanian sedang menurun atau belum masuk sama sekali.

Pemanfaatan pekarangan dan lahan di sekitar rumah juga menjadi bagian penting dari strategi diversifikasi yang dilakukan oleh rumah tangga pra sejahtera. Lahan sempit yang tersedia di halaman rumah dimanfaatkan secara maksimal untuk menanam berbagai jenis tanaman konsumsi seperti cabai, terong, bawang merah, serai, daun jeruk, tomat, dan berbagai tanaman produktif lainnya. Hasil tanaman tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur keluarga sendiri sehingga mengurangi pengeluaran belanja harian, tetapi juga sebagian dijual untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Sebagian rumah tangga bahkan memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk membangun kolam ikan sederhana atau menanam pohon buah-buahan yang hasilnya dapat dijual ke pasar atau kepada pedagang yang datang langsung ke desa. Keseluruhan upaya diversifikasi ini, meskipun secara individual menghasilkan pendapatan yang relatif kecil, secara kolektif membentuk jaring pengaman ekonomi yang cukup vital bagi keberlangsungan hidup rumah tangga pra sejahtera dalam menghadapi ketidakpastian yang menjadi bagian tak terelakkan dari kehidupan mereka sehari-hari.

Temuan dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Krisna dan Teguh Prasetyo (2023) yang menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi serta pemberdayaan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Perbedaannya, dalam penelitian ini praktik diversifikasi yang dilakukan masyarakat masih berada pada skala kecil dan cenderung tidak terstruktur. Kegiatan tersebut umumnya bersifat tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan sebagai strategi ekonomi yang direncanakan secara matang. Selain itu, keterbatasan modal, akses, dan keterampilan turut memengaruhi hasil yang diperoleh. Diversifikasi yang dilakukan belum mampu memberikan peningkatan kesejahteraan secara signifikan, melainkan lebih berfungsi sebagai penopang sementara dalam menjaga keberlangsungan hidup.

Strategi Coping (Reaktif, Berorientasi Bertahan Hidup Jangka Pendek) Pengelolaan Pengeluaran Secara Ketat

Strategi adaptif berikutnya yang sangat menonjol dalam kehidupan rumah tangga pra sejahtera di Desa Munggu adalah kemampuan mengelola pengeluaran secara sangat ketat dan terstruktur sebagai respons langsung terhadap kondisi pendapatan yang tidak menentu dan tidak dapat diprediksi. Dalam situasi di mana pemasukan tidak pernah bisa dipastikan jumlahnya dari satu periode ke periode berikutnya, pengelolaan sisi pengeluaran menjadi satu-satunya variabel yang masih dapat dikendalikan oleh rumah tangga pra sejahtera. Kemampuan untuk mengatur dan menekan pengeluaran secara efisien bukan sekadar keterampilan finansial biasa, melainkan merupakan kompetensi bertahan hidup yang sangat vital dan sudah terinternalisasi secara mendalam dalam keseharian rumah tangga pra sejahtera sebagai hasil dari pengalaman panjang hidup dalam keterbatasan.

Pola pengelolaan pengeluaran yang diterapkan oleh rumah tangga pra sejahtera memiliki hierarki yang sangat jelas dan konsisten. Kebutuhan pangan sehari-hari selalu menempati urutan paling atas dalam skala prioritas pengeluaran, karena pemenuhan kebutuhan makan merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan paling tidak bisa ditunda. Segera setelah kebutuhan pangan terpenuhi, prioritas berikutnya adalah kebutuhan pendidikan anak-anak, yang meliputi uang saku harian, biaya transportasi, perlengkapan sekolah, dan berbagai iuran yang kerap muncul selama tahun ajaran berlangsung. Kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat sekunder atau tidak mendesak, seperti perbaikan rumah, pembelian perabot, atau pengeluaran untuk hiburan dan rekreasi, secara konsisten ditunda atau bahkan diabaikan sepenuhnya hingga kondisi keuangan memungkinkan, yang dalam kenyataannya seringkali tidak pernah benar-benar terwujud.

Kemampuan untuk menahan diri dari pengeluaran yang tidak esensial dan terus-menerus membuat pilihan-pilihan sulit dalam mengalokasikan sumber daya yang sangat terbatas merupakan bentuk disiplin ekonomi yang sangat berat untuk dijalani dalam jangka panjang. Namun bagi rumah tangga pra sejahtera, pola hidup hemat ini bukan lagi sesuatu yang memerlukan usaha atau keputusan yang disengaja, melainkan sudah menjadi kebiasaan yang tertanam sangat dalam dan berjalan secara otomatis dalam keseharian. Ketika pendapatan yang masuk sudah habis hanya untuk memenuhi kebutuhan paling dasar, tidak ada ruang tersisa untuk pengeluaran yang bersifat lebih dari sekadar kebutuhan hidup minimum. Kondisi ini menciptakan sebuah pola hidup yang sangat terstruktur di sekitar keterbatasan, di mana setiap keputusan pengeluaran, sekecil apapun, selalu dipertimbangkan dengan sangat cermat dan selalu dikembalikan pada pertanyaan yang paling mendasar, yaitu apakah pengeluaran ini benar-benar dibutuhkan saat ini atau masih dapat ditunda.

Pemanfaatan Jaringan Sosial: Utang Piutang sebagai Jaring Pengaman

Strategi adaptif yang juga memainkan peran penting dalam kehidupan rumah tangga pra sejahtera di Desa Munggu adalah pemanfaatan jaringan sosial yang ada di dalam komunitas, khususnya melalui praktik utang piutang informal yang berfungsi sebagai jaring pengaman ketika kondisi ekonomi sedang dalam tekanan yang paling berat. Dalam situasi di mana akses terhadap lembaga keuangan formal seperti bank atau koperasi sangat terbatas baik karena kendala administratif, ketiadaan agunan, maupun karena rendahnya tingkat kepercayaan terhadap institusi formal jaringan sosial informal yang terbangun di antara sesama warga dengan kondisi ekonomi yang serupa menjadi sumber dukungan yang paling mudah diakses dan paling dapat diandalkan dalam situasi darurat.

Praktik utang piutang dalam konteks masyarakat pra sejahtera di Desa Munggu tidak dapat dipahami semata-mata sebagai transaksi ekonomi biasa, melainkan sebagai ekspresi dari hubungan sosial yang sudah terjalin lama dan dilandasi oleh kepercayaan yang tumbuh dari kebersamaan dalam menghadapi kondisi hidup yang serupa. Ketika pendapatan bulan ini tidak mencukupi untuk membeli kebutuhan dapur, ketika biaya sekolah anak tiba-tiba harus dibayar sementara panen belum tiba, atau ketika ada kebutuhan mendesak lainnya yang tidak dapat ditunda, tetangga dan saudara menjadi tempat pertama yang dituju untuk meminjam uang atau kebutuhan dalam bentuk barang. Pinjaman ini hampir tidak pernah disertai dengan bunga, tidak terikat pada jadwal pengembalian yang kaku, dan prosesnya berlangsung sangat cepat tanpa prosedur administratif yang rumit, karena didasarkan sepenuhnya pada kepercayaan dan hubungan sosial yang sudah terbangun kuat. Kondisi praktik utang-piutang pada penelitian ini justru melampaui deskripsi Lewis. Lewis menggambarkan komunitas dalam budaya kemiskinan sebagai sesuatu yang lemah dalam organisasi kolektif dan lebih berpusat pada keluarga inti. Jaringan sosial yang ditemukan di Desa Munggu yang melampaui keluarga inti dan melibatkan tetangga secara luas menunjukkan bahwa tidak semua ciri Lewis berlaku universal.

Dimensi sosial dari praktik utang piutang ini jauh melampaui fungsi ekonominya semata. Ketersediaan seseorang untuk meminjamkan uang atau kebutuhan kepada tetangga yang sedang kesulitan merupakan ekspresi dari solidaritas sosial yang menjadi salah satu nilai paling kuat yang hidup di tengah masyarakat pedesaan. Di sisi yang lain, penerimaan pinjaman dari tetangga atau saudara juga menciptakan ikatan sosial yang saling mengikat dan saling menguatkan, karena yang meminjam pada suatu saat akan berada di posisi yang meminjamkan di saat yang lain. Siklus timbal balik dalam praktik utang piutang ini menciptakan sebuah sistem dukungan sosial yang bersifat informal namun sangat efektif dalam membantu anggota komunitas yang paling rentan untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang paling sulit sekalipun. Mengandalkan Bantuan Sosial sebagai Penyangga Kebutuhan

Strategi adaptif berikutnya yang secara konsisten ditemukan dalam kehidupan rumah tangga pra sejahtera di Desa Munggu adalah pemanfaatan bantuan sosial dari pemerintah sebagai penyangga kebutuhan dasar yang sangat diandalkan dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Program-program bantuan sosial seperti PKH, BLT, dan bantuan kesejahteraan (Kesra) yang disalurkan secara rutin oleh pemerintah telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bertahan hidup rumah tangga pra sejahtera, mengingat pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan utama seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar keluarga secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, pemanfaatan bantuan sosial oleh rumah tangga pra sejahtera dilakukan dengan cara yang sangat terencana dan terstruktur meskipun dalam skala yang sangat sederhana. Bantuan PKH yang diterima secara konsisten diprioritaskan untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak-anak, mulai dari pembelian perlengkapan sekolah seperti seragam, sepatu, buku pelajaran, dan alat tulis, hingga uang saku harian dan berbagai iuran sekolah yang kerap muncul sepanjang tahun ajaran. Bagi keluarga yang memiliki anak di jenjang pendidikan menengah atau bahkan perguruan tinggi, alokasi bantuan untuk pendidikan menjadi sangat krusial mengingat beban biaya yang semakin meningkat seiring dengan jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Sementara itu, bantuan BLT dan Kesra dimanfaatkan terutama untuk

memenuhi kebutuhan konsumsi pokok rumah tangga seperti beras, minyak goreng, gula, dan berbagai bahan dapur lainnya yang menjadi kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan sehari-hari.

Keberadaan bantuan sosial ini memberikan kepastian minimal yang sangat berarti bagi rumah tangga pra sejahtera, yaitu bahwa setidaknya ada satu sumber pemasukan yang relatif dapat diandalkan dan diprediksi dalam setiap periode pencairan, di tengah ketidakpastian pendapatan dari sektor pertanian dan pekerjaan informal yang menjadi sumber utama kehidupan mereka. Kepastian minimal ini memberikan ruang bernapas secara psikologis, karena mengurangi tingkat kecemasan dan ketidakpastian yang dirasakan oleh keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Rasa tenang yang muncul dari kepastian bahwa bantuan akan cair pada waktu tertentu memungkinkan keluarga untuk membuat perencanaan yang lebih terstruktur, meskipun dalam skala yang sangat terbatas dan hanya menjangkau kebutuhan jangka pendek.

Strategi Bertahan melalui Kesederhanaan

Strategi adaptif terakhir yang juga sangat kuat mewarnai kehidupan rumah tangga pra sejahtera di Desa Munggu adalah strategi bertahan hidup melalui penerapan gaya hidup yang sangat sederhana dan penuh keterbatasan sebagai pilihan yang paling rasional dalam kondisi yang ada. Kesederhanaan dalam konteks ini bukan sekadar nilai budaya atau pilihan filosofis yang diambil secara bebas, melainkan merupakan strategi ekonomi yang sangat pragmatis dan sangat rasional sebagai respons terhadap kondisi kemiskinan yang sudah berlangsung lama. Ketika pendapatan yang tersedia sangat terbatas dan tidak menentu, menyesuaikan seluruh gaya hidup dengan batas-batas yang ditentukan oleh keterbatasan tersebut merupakan pilihan yang paling logis dan paling memungkinkan untuk dijalankan secara konsisten dari hari ke hari.

Dalam praktiknya, strategi kesederhanaan ini tercermin dalam hampir setiap aspek kehidupan rumah tangga pra sejahtera. Dari sisi konsumsi pangan, keluarga terbiasa mengonsumsi makanan yang sangat sederhana dan terjangkau, memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di sekitar rumah seperti hasil tanaman pekarangan, dan membatasi pembelian lauk-pauk hanya pada kebutuhan yang paling minimal. Tidak ada pengeluaran untuk makanan atau minuman yang bersifat tersier atau mewah, karena seluruh sumber daya yang ada harus dialokasikan untuk kebutuhan yang jauh lebih mendasar dan lebih mendesak. Pola konsumsi pangan yang sangat sederhana ini bukan hanya berlaku pada kondisi darurat, tetapi sudah menjadi pola hidup permanen yang dijalani dari hari ke hari sebagai bagian dari ritme kehidupan yang dianggap normal dan wajar.

Dari sisi hunian dan kepemilikan barang, rumah tangga pra sejahtera juga menerapkan prinsip kesederhanaan yang sangat konsisten. Tidak ada dorongan untuk merenovasi atau memperbaiki kondisi fisik rumah yang sudah tidak layak selama masih dapat berfungsi sebagai tempat berlindung. Perabot dan peralatan rumah tangga yang dimiliki sangat terbatas dan umumnya sudah cukup tua, namun tetap dipertahankan dan dirawat sebaik mungkin agar dapat terus digunakan selama mungkin tanpa harus membeli yang baru. Pengeluaran untuk barang-barang yang bersifat sekunder atau tersier seperti elektronik baru, kendaraan, atau kebutuhan hiburan hampir tidak pernah dilakukan, karena prioritas selalu dikembalikan pada pemenuhan kebutuhan yang paling dasar dan paling mendesak.

Yang menjadikan strategi kesederhanaan ini lebih dari sekadar penghematan biasa adalah kemampuan rumah tangga pra sejahtera untuk menemukan makna, kebahagiaan, dan rasa syukur dalam kondisi yang secara objektif sangat terbatas. Kebahagiaan tidak diukur dari jumlah materi yang dimiliki atau standar konsumsi yang dicapai, melainkan dari hal-hal yang jauh lebih sederhana dan lebih dekat, seperti melihat anak-anak dapat pergi ke sekolah setiap hari, berkumpul bersama keluarga, dan mampu menyediakan makanan meskipun sangat sederhana untuk seluruh anggota keluarga. Kemampuan untuk tetap merasa cukup dan bersyukur dalam kondisi yang demikian terbatas merupakan kekuatan psikologis yang sangat penting, karena memungkinkan rumah tangga pra sejahtera untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan ketenangan dan ketabahan yang cukup untuk terus bertahan menghadapi segala tekanan dan ketidakpastian yang tidak pernah benar-benar berhenti menghampiri kehidupan mereka.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Desa Munggu

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang dirancang dengan filosofi yang berbeda dari sekadar bantuan langsung tanpa syarat. PKH mensyaratkan bahwa keluarga penerima manfaat memenuhi kondisionalitas tertentu terkait kesehatan dan pendidikan, seperti memastikan anak-anak hadir di sekolah secara rutin, membawa balita ke Posyandu untuk pemeriksaan tumbuh kembang, dan memastikan ibu hamil mendapatkan pemeriksaan kehamilan yang diperlukan. Filosofi di balik kondisionalitas ini adalah bahwa bantuan tunai saja tidak cukup untuk memutus siklus kemiskinan antargenerasi; yang diperlukan adalah perubahan perilaku yang mendorong investasi dalam modal manusia melalui pendidikan dan kesehatan.

Penerapan kondisionalitas PKH di Desa Munggu menunjukkan berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, verifikasi kepatuhan terhadap kondisionalitas sering kali tidak dilakukan secara konsisten dan ketat. Pendamping PKH yang bertanggung jawab untuk memverifikasi pemenuhan kondisionalitas oleh KPM memiliki beban kerja yang sangat berat, mengingat satu pendamping sering kali harus mendampingi ratusan KPM yang tersebar di berbagai dusun yang tidak selalu mudah dijangkau. Akibatnya, verifikasi kondisionalitas sering kali dilakukan secara administratif berdasarkan laporan yang ada, bukan berdasarkan verifikasi lapangan yang aktual. Ketika verifikasi tidak dilakukan secara ketat, insentif bagi KPM untuk benar-benar memenuhi kondisionalitas pun menjadi berkurang, dan tujuan transformatif program tidak dapat dicapai secara optimal.

Permasalahan ketepatan sasaran merupakan salah satu permasalahan paling fundamental dalam penerapan program bantuan sosial di Desa Munggu. Sistem penargetan yang digunakan mengandalkan basis data terpadu kesejahteraan sosial yang idealnya mencerminkan kondisi ekonomi aktual setiap keluarga. Dalam praktiknya, basis data ini sering kali tidak mencerminkan kondisi terkini karena proses pembaruan data yang lambat dan prosedur yang rumit. Keluarga yang kondisi ekonominya sudah membaik dan seharusnya keluar dari daftar penerima (graduation) mungkin masih tercantum karena proses verifikasi dan pembaruan yang belum dilakukan, sementara keluarga yang baru jatuh miskin akibat musibah atau perubahan kondisi belum masuk dalam daftar karena proses pendaftaran yang memakan waktu. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya inclusion error dan exclusion error secara bersamaan. Penerapan PKH di Desa Munggu melalui lensa teori Oscar Lewis bermakna kondisionalitas yang lemah dan ketidaktepatan sasaran sesungguhnya bukan sekadar persoalan teknis administratif. Lewis menegaskan bahwa program yang tidak menyentuh dimensi kultural dan psikologis penerima manfaat hanya akan bekerja di permukaan. PKH memiliki potensi transformatif melalui mekanisme kondisionalitasnya, namun ketika verifikasi tidak dijalankan secara konsisten, program ini kehilangan daya ubahnya dan bergeser menjadi sekadar transfer tunai biasa yang tidak berbeda jauh dari bantuan karitatif yang Lewis nilai tidak mampu memutus budaya kemiskinan secara berkelanjutan.

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) hadir dengan filosofi yang paling sederhana di antara ketiga program ini: memberikan uang tunai secara langsung kepada keluarga miskin atau rentan tanpa syarat apapun. BLT biasanya bersifat sementara dan responsif terhadap guncangan, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, inflasi pangan, atau dampak pandemi. Filosofi di balik BLT adalah bahwa dalam situasi darurat atau krisis, kecepatan dan fleksibilitas lebih penting daripada kondisionalitas. Keluarga penerima dinilai paling tahu apa yang paling mereka butuhkan, sehingga uang tunai tanpa syarat memberikan ruang bagi mereka untuk mengalokasikan sendiri sesuai prioritas mendesak.

Penerapan BLT di Desa Munggu menghadapi permasalahan yang tidak kalah kompleks. Pertama, masalah pendataan penerima yang bersifat ad hoc. Berbeda dengan PKH yang memiliki basis data penerima tetap yang diperbarui secara berkala, BLT sering kali diluncurkan dalam waktu singkat sebagai respons terhadap kebijakan tertentu. Akibatnya, proses penetapan penerima sering kali tergesa-gesa dan sangat bergantung pada musyawarah desa yang tidak selalu berjalan ideal. Di Desa Munggu, ditemukan bahwa dalam beberapa putaran penyaluran BLT, keputusan tentang siapa yang berhak menerima lebih banyak ditentukan oleh suara mayoritas dalam musyawarah desa daripada oleh data objektif tentang tingkat kemiskinan. Hal ini membuka peluang bagi munculnya elite capture, di mana keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan atau kedekatan politik dengan perangkat desa lebih mudah dimasukkan sebagai penerima, sementara keluarga miskin yang tidak memiliki jaringan sosial yang kuat justru terpinggirkan.

Kedua, potensi penyalahgunaan dalam proses penyaluran. Karena BLT disalurkan dalam bentuk uang tunai, risiko kebocoran lebih tinggi dibandingkan program non tunai seperti BPNT atau PKH yang melalui rekening bank. Di Desa Munggu, ditemukan praktik potongan dana yang dilakukan oleh oknum aparat desa atau pihak ketiga yang mengaku membantu pencairan. Meskipun nominal potongan bisa kecil, bagi keluarga miskin hal ini merupakan pengurangan signifikan atas manfaat yang seharusnya mereka terima. Selain itu, mekanisme pengambilan BLT yang mengharuskan penerima datang ke balai desa pada waktu tertentu sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik vote buying atau mobilisasi politik dengan kedok bantuan sosial.

Ketiga, masalah ketepatan waktu penyaluran. BLT dirancang sebagai jaring pengaman darurat, sehingga waktu penyaluran seharusnya tepat ketika masyarakat paling membutuhkan. Namun di Desa Munggu, sering terjadi keterlambatan penyaluran BLT akibat lambatnya transfer dana dari pusat ke daerah atau akibat proses verifikasi ulang yang berlarut-larut. Ketika BLT turun setelah harga-harga sudah kembali normal atau setelah krisis berlalu, fungsi program sebagai respons darurat menjadi tumpul. Keterlambatan ini juga menciptakan ketergantungan yang tidak sehat, karena penerima mulai menganggap BLT sebagai pendapatan rutin yang dapat diandalkan, padahal sifat program adalah sementara.

Keempat, dampak psikologis dan sosial dari skema tanpa syarat. Meskipun tanpa syarat adalah keunggulan BLT dalam situasi darurat, di tingkat desa hal ini juga menimbulkan dampak sampingan. Tanpa kondisionalitas apapun, BLT cenderung menimbulkan kecemburuan sosial yang lebih tajam dibandingkan PKH. Masyarakat yang tidak menerima sering mempertanyakan: "Mengapa dia dapat uang gratis tanpa melakukan apa pun?" Stigma bahwa penerima BLT adalah "pemalas" atau "mencari untung dari kesusahan negara" cukup kuat di Desa Munggu. Hal ini membuat beberapa penerima merasa malu atau tertekan secara psikologis, terutama ketika pengambilan BLT dilakukan secara terbuka di depan umum.

Dalam perspektif Lewis, BLT adalah program yang paling jauh dari apa yang di bayangkan sebagai solusi atas budaya kemiskinan. Tanpa kondisionalitas, tanpa pendampingan, dan tanpa mekanisme yang mendorong penerima untuk berperan aktif dalam memperbaiki kondisinya sendiri, BLT justru berpotensi memperkuat salah satu ciri utama budaya kemiskinan yang Lewis identifikasi yakni ketergantungan pada pihak luar dan melemahnya inisiatif mandiri. Kecemburuan sosial dan stigma yang muncul di Desa Munggu pun sejalan dengan prediksi Lewis bahwa dalam masyarakat yang sudah memiliki budaya kemiskinan, bantuan tanpa syarat cenderung mempertegas batas antara penerima dan bukan penerima tanpa mengubah kondisi struktural yang mendasarinya.

Bantuan Kesejahteraan Sosial (KESRA)

Program Bantuan Kesejahteraan Sosial (KESRA) hadir dengan mandat yang berbeda dari PKH dan BLT. Jika PKH berfokus pada kondisionalitas untuk investasi modal manusia dan BLT pada jaring pengaman darurat tanpa syarat, maka KESRA dirancang sebagai payung bagi warga lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas yang tidak mampu. Filosofi utamanya adalah pengakuan atas kerentanan struktural yang melekat bukan karena kemalasan atau kurangnya upaya, melainkan karena keterbatasan fisik dan usia yang membuat mereka tidak mungkin memenuhi syarat seperti peserta PKH atau berpartisipasi aktif dalam pasar kerja.

Penerapan KESRA di Desa Munggu membuka jendela analitis yang berbeda: bukan soal kegagalan kondisionalitas atau keterlambatan respons darurat, melainkan soal kegagalan pengakuan dan jangkauan. Pertama, masalah identifikasi dan validasi penerima. Di Desa Munggu, banyak lansia dan penyandang disabilitas yang secara ekonomi jelas tidak mampu tetapi tidak terdaftar sebagai penerima KESRA. Hal ini disebabkan oleh stigma sosial bahwa menerima bantuan adalah aib, sehingga banyak keluarga yang menyembunyikan eksistensi lansia atau disabilitas anggota rumah tangganya. Selain itu, proses validasi DTKS di tingkat desa sering kali tidak proaktif menjemput bola; perangkat desa cenderung menunggu laporan mandiri, sementara warga dengan disabilitas berat atau lansia yang sudah tidak produktif justru paling tidak mampu mengurus administrasi. Akibatnya, terjadi *exclusion error* yang sangat tinggi.

Kedua, persoalan distribusi yang tidak ramah kerentanan. Lokasi pengambilan bantuan KESRA (biasanya di balai desa atau kantor pos terdekat) sering kali tidak dapat dijangkau oleh lansia dengan mobilitas terbatas atau penyandang disabilitas fisik. Tidak ada mekanisme penyaluran door-to-door yang sistematis. Keluarga penerima yang tidak memiliki anggota keluarga muda yang sehat terpaksa membayar jasa ojek atau meminta tolong tetangga, yang secara implisit memotong nilai manfaat bersih bantuan. Bahkan dalam beberapa kasus, lansia memilih untuk tidak mengambil bantuan sama sekali karena biaya dan tenaga yang dikeluarkan dinilai tidak sebanding.

Ketiga, ketiadaan mekanisme pendampingan khusus. Berbeda dengan PKH yang memiliki pendamping, KESRA di Desa Munggu tidak dilengkapi dengan pendamping khusus yang memahami isu lansia dan disabilitas. Akibatnya, ketika terjadi masalah administrasi seperti kartu rusak, data tidak cocok, atau pencairan tertunda—penerima KESRA tidak memiliki agen yang dapat membantu. Mereka yang sudah memiliki keterbatasan kognitif atau fisik menjadi sangat rentan terhadap praktik percaloan atau pungutan liar yang justru muncul sebagai "solusi informal" atas kebuntuan birokrasi.

Keempat, problem koherensi kebijakan di tingkat desa. Di Desa Munggu, ditemukan tumpang tindih antara penerima KESRA dengan PKH dalam satu keluarga. Secara nasional, aturan melarang penerimaan ganda, namun di tingkat desa, tekanan sosial dan keterbatasan data real-time menyebabkan beberapa keluarga justru kehilangan KESRA karena salah satu anggota keluarga terdaftar sebagai penerima PKH, meskipun secara kebutuhan lansia di keluarga tersebut tetap membutuhkan bantuan tersendiri. Sebaliknya, ada keluarga yang melepas keikutsertaan PKH karena tidak mampu memenuhi kondisionalitas, lalu beralih ke KESRA, tetapi proses peralihannya memakan waktu berbulan-bulan sehingga menimbulkan kekosongan bantuan.

KESRA menysasar kelompok yang menjurut Lewis paling rentan dalam budaya kemiskinan yakni yang secara fisik tidak lagi mampu berpartisipasi dalam pasar kerja. Tingginya *exclusion error* dan absennya pendampingan khusus di Desa Munggu menunjukkan bahwa program ini gagal pada hal yang paling mendasar, yaitu pengakuan dan penjangkauan. Lewis menekankan bahwa salah satu dampak terdalam budaya kemiskinan adalah perasaan tidak diakui dan tidak dihitung oleh institusi masyarakat yang lebih

luas. Ketika lansia dan penyandang disabilitas justru tidak terjangkau oleh program yang dirancang untuk mereka, perasaan marjinalisasi yang menurut Lewis semakin menguat, bukan berkurang.

SIMPULAN

Kebudayaan kemiskinan (Oscar Lewis) diperlakukan sebagai lapisan turunan, yaitu pola sikap dan perilaku yang terbentuk sebagai konsekuensi dari keterbatasan struktural (akses lahan, modal, lembaga keuangan formal, dan program pemberdayaan yang berkelanjutan), bukan sebagai penyebab kemiskinan yang berdiri sendiri.

Pertama, kondisi objektif sosial ekonomi rumah tangga pra-sejahtera di Desa Munggu ditandai oleh ketidakstabilan pendapatan yang bersumber dari sektor informal dan pertanian tradisional. Mata pencaharian utama sebagian besar subjek meliputi buruh tani, petani kecil, dan pekerja serabutan dengan penghasilan yang sangat fluktuatif dan bergantung pada musim serta permintaan pasar. Kondisi tersebut menyebabkan rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara konsisten, sehingga pengeluaran rumah tangga lebih banyak terserap untuk kebutuhan konsumsi harian, sementara investasi jangka panjang seperti pendidikan dan pengembangan usaha sangat terbatas. Selain itu, kondisi tempat tinggal yang belum memadai, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta rendahnya tingkat pendidikan semakin memperparah kerentanan ekonomi yang dialami.

Kedua, praktik kebudayaan kemiskinan pada rumah tangga pra-sejahtera di Desa Munggu termanifestasi dalam sejumlah pola perilaku dan nilai yang sejalan dengan konsep *culture of poverty* Oscar Lewis. Sikap fatalistik dan pasrah terhadap kondisi hidup tampak pada tuturan para subjek yang menerima kemiskinan sebagai bagian tak terhindarkan dari kehidupan. Orientasi hidup jangka pendek juga menjadi ciri menonjol, di mana keputusan ekonomi lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan hari ini daripada perencanaan masa depan. Ketergantungan pada bantuan sosial yang semula bersifat sementara cenderung bergeser menjadi kebiasaan dan bagian dari siklus kehidupan yang dinormalisasi. Pola-pola ini diwariskan secara tidak langsung kepada generasi berikutnya melalui proses sosialisasi dalam keluarga, termasuk terbatasnya dorongan orang tua terhadap mobilitas pendidikan anak. Di antara pola-pola tersebut, ketergantungan pada bantuan sosial dan sikap pasrah/fatalistik tampil sebagai pola yang paling dominan sekaligus saling menguatkan, dan keduanya lebih tepat dibaca sebagai konsekuensi dari keterbatasan struktural, yakni minimnya akses terhadap lembaga keuangan formal, lapangan kerja di luar pertanian tradisional, dan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, dibandingkan sebagai patologi budaya yang berdiri sendiri.

Ketiga, kategori strategi adaptif yang diterapkan rumah tangga pra-sejahtera dalam menghadapi kemiskinan dapat dikelompokkan ke dalam tiga pola utama. Pertama, strategi penghematan dan penyesuaian konsumsi, yaitu dengan memangkas pengeluaran seminimal mungkin, memprioritaskan kebutuhan pokok seperti pangan, serta menunda pemenuhan kebutuhan yang dianggap tidak mendesak. Kedua, pemanfaatan sumber daya lingkungan, seperti menanam tanaman konsumsi di pekarangan rumah untuk mengurangi pengeluaran belanja dapur. Ketiga, pemanfaatan jaringan sosial dan bantuan pemerintah, di mana rumah tangga pra-sejahtera mengandalkan dukungan sesama warga, kerabat, serta program bantuan sosial seperti PKH, BLT, dan Kesra sebagai penyangga ekonomi ketika sumber pendapatan utama tidak mencukupi. Strategi-strategi tersebut bersifat reaktif terhadap kondisi kekurangan, bukan proaktif dalam membangun kemandirian ekonomi. Dari lima bentuk respons tersebut, hanya diversifikasi mata pencaharian yang secara konseptual tergolong strategi adaptif, karena berorientasi memperluas basis pendapatan secara jangka panjang. Empat bentuk lainnya, yaitu penghematan pengeluaran, pemanfaatan jaringan sosial melalui utang piutang, ketergantungan pada bantuan sosial, dan gaya hidup sederhana, secara konseptual tergolong strategi coping, karena bersifat reaktif dan tidak mengubah posisi struktural rumah tangga dalam sistem ekonomi.

Keempat, program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Desa Munggu, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan kesejahteraan (Kesra), terbukti memberikan dampak positif dalam jangka pendek berupa pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan biaya pendidikan anak. Bantuan sosial tersebut juga memberikan dampak psikologis berupa rasa aman bagi penerima manfaat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Namun demikian, program-program tersebut belum mampu mengubah kondisi struktural kemiskinan yang dialami rumah tangga pra-sejahtera. Bantuan bersifat kuratif dan karitatif, belum menyentuh akar permasalahan berupa keterbatasan akses terhadap pendidikan, keterampilan, dan lapangan kerja yang layak. Di samping itu, mekanisme penyaluran yang belum sepenuhnya tepat sasaran serta minimnya komponen pemberdayaan dalam program menyebabkan potensi ketergantungan justru semakin menguat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas agar program penanggulangan kemiskinan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Prakarsa, S. U. (2018). Bantuan Dana Bank Dunia Dalam Perspektif Pemenuhan Hak-hak Ekosob: Studi Kasus Pada Sektor Pendidikan di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 151-172.
- Maulana, F. R., Hasnita, N., & Evriyenni, E. (2020). Pengaruh pengetahuan produk dan word of mouth terhadap keputusan nasabah memilih bank syariah. *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 124-137.
- Afifah, W., & Paruntu, D. N. (2015). Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Mimbar Keadilan*, 150, 169.
- Huraerah, A. (2013). Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 3-13.
- Fardi, M., & Pratama, IN (2023). Transparansi Pendataan Program Bantuan Sosial Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pegesangan Kota Mataram. *Jurnal Masalah Sosial dan Kebijakan*, 150-155.
- Hariato, S. (2015). Relasi Orang Miskin dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. In *Bali: Makalah Seminar Nasional Riset Inovatif (SENARI) III*.
- Arsjad, M. F., Hunawa, R., Nuna, M., & Walahe, D. (2022). Peranan Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiyadaa. *Economics and Digital Business Review*, 3(2), 379-396.
- Hariato, S. (2018). Gaya Hidup konsumtif Penerima Bantuan PKH (Studi di desa Rejosari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung). *Paradigma*, 6(1).
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Fadhli, K., & Nazila, L. R. (2023). Pengaruh implementasi bantuan sosial BPNT dan PKH terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Education and development*, 11(2), 196-202.
- Wulan, Y. C., Ati, N. U., & Widodo, R. P. (2019). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)(Studi Tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, Jawa Timur). *Respon Publik*, 13(4), 104-109.
- Rizaldi, A. (2017). *Budaya Kemiskinan Masyarakat Pesisir Di Sekitar Waduk Pluit Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).
- Djaenal, R., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. *Governance*, 1(2).
- Arifin, J. (2020). Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2), 114-132.
- Hariato. (2020). Motif Rumah Tangga Miskin Dalam Penerimaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps). *Paradigma*, 9(2).
- Hotimah, K. (2019). *PEWARISAN BUDAYA KEMISKINAN DALAM KEHIDUPAN PETANI GARAM Studi Pada Kelompok Petani Garam di Desa Lembung, Kec. Galis, Kab. Pamekasan, Madura* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Putranto, G. L. D. (2018). *TOGEL DALAM BUDAYA KEMISKINAN MASYARAKAT (Studi Deskriptif Judi Togel Dalam Tinjauan Kebudayaan Kemiskinan)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Andini, N. A. Budaya Kemiskinan Dan Kebijakan Pemerataan Raskin Sebagai Savety Valve Di Dusun Pelinggihan Antirogo.
- Aryani, YC, & Zuber, A. (2017). Budaya kemiskinan di kota Surakarta (Studi etnografi di pinggir rel Palang Joglo, Kadipiro). *DILEMA*, 32 (2), 64-79.
- PUTRA, DF (2017). *BUDAYA KEMISKINAN PADA ETNIS BETAWI (Studi Kasus: 4 Keluarga Betawi di Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur)* (Disertasi Doktor, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).
- Prasanna, K. (2016). Program pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan inklusif di India. *Imperial Journal of Interdisciplinary Research*, 2 (3), 17-21.
- Antai, AS, & Anam, BE (2014). Program Pemberantasan Kemiskinan Nasional dan penanggulangan kemiskinan di Nigeria: penyelidikan empiris dampak program di Negara Bagian Cross River. *Jurnal Internasional Studi Sumber Daya Manusia*, 4 (3), 269.
- Rabby, AH (2024). Pemberdayaan Perempuan melalui Pendekatan Pembangunan Terpadu: Studi Kasus Program Penanggulangan Kemiskinan (PEP). *Jurnal Judikaltura*, 2 (2), 15-32.
- Achmad, W. (2022). Implementation of the joint business group (KUBE) program in poverty alleviation in sumedang district. *Jurnal Ekonomi*, 11(02), 1036-1042.

- Simangunsong, H., & Sihotang, D. (2023). The impact of economic conditions on social assistance programs and poverty alleviation. *Law and Economics*, 17(2), 73-91.
- Prasetyo, T., Widodo, P., Saragih, H. J. R., Suwarno, P., & Said, B. D. (2023). Poverty Reduction For Coastal Communities In Indonesia Through Community Empowerment Training. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences*, 2(6).
- Hazanah, N., Supriatna, T., Sartika, I., & Santoso, E. B. (2023). Policy Network On Extreme Poverty Alleviation Program: A Study of the Implementation of Extreme Poverty Alleviation Program in Bandung Regency, West Java Province. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 5(2), 41-46.
- Indiahono, D., & Satyawan, D. S. (2023). Perspectives of Online News Media on Extreme Poverty and Regional Budget Policy Response. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 3(2), 81-90.
- Onyernama, J. C., Adekunle, B. J., Egwu, C., & Ada, C. O. (2024). Poverty alleviation programs and economic development evidence from Nigeria. *International Journal of Business and Applied Economics*, 3(2), 323-324.
- Ogundele, O. J. K., Akingbade, W. A., & Akinlabi, H. B. (2012). Entrepreneurship training and education as strategic tools for poverty alleviation in Nigeria. *American international journal of contemporary research*, 2(1), 148-156.
- Nawawi, M., Ali, A., Irawan, B., Ahmad, B., Mukramin, S. U., Marsuki, N. R., ... & Kaya, I. R. G. (2020). The village kalesang program as a poverty alleviation community. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3), 3103-3107.
- Echezona, N. (2015). *Entrepreneurship education as a strategy for the promotion of entrepreneurship culture and poverty reduction among university students* (Doctoral dissertation, University of Fort Hare).
- Nujum, S., & Pratiwi, F. R. (2018). Poverty Alleviation through Institutional Empowerment of Social and Economy on Poor Society in Gowa Regency. *Review of Economics and Development Studies*, 4(1), 23-29.
- Putra, F. (2022). Village development initiative as an alternative strategy of rural poverty reduction: An evaluation of village fund program in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(04), 14531460.
- Blocker, C. P., Ruth, J. A., Sridharan, S., Beckwith, C., Ekici, A., Goudie-Hutton, M., ... & Varman, R. (2013). Understanding poverty and promoting poverty alleviation through transformative consumer research. *Journal of business research*, 66(8), 1195-1202.
- Francis, P., & James, R. (2003). Balancing rural poverty reduction and citizen participation: The contradictions of Uganda's decentralization program. *World Development*, 31(2), 325-337.
- Nuryadi, D. A., Resmi, M. G., & Lestari, C. D. (2023). Decision Support System for Extreme Poverty BLT Recipients Combining the ROC and WASPAS Methods. *TIERS Information Technology Journal*, 4(1), 83-91.
- Modupe, F. M. (2008). Economic Implication of Poverty Alleviation Programs on Rural Women in. *Journal of Social Sciences*, 4(4), 352-357.
- Hariato, S., Hidayat, K., Sukesi, K., & Yuliati, Y. (2014). Characteristic and social processes of poverty reduction in rural community: An empirical finding. *Research in Humanities and Social Sciences*, 4(3).